

**KEPENTINGAN TIONGKOK DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN
2013-2017**

Oleh : Rafqi Syawali

rafqi.syawali@yahoo.com

Pembimbing: Faisyal Rani,S.IP, M.A

Bibliografi: 25 Jurnal dan/atau Research Paper,

7 Buku, 5Dokumen dan Publikasi Resmi, 13 Situs Web

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a political study which describes the interest of Tiongkok in Afghanistan conflict. This research will focus on what made Tiongkok joint in Afghanistan conflict. This study interesting because describe about Tiongkok interest in the conflict in Afghanistan is to maintain the security of the sovereignty and economic stability. This is qualitative research which used descriptive methods, and collecting datas from some resources like books, journals, official publications and relevant websites. This paper used the realism perspective and National Interest from Donald E. Nuechterlein. The object in this research is Tiongkok as main actor in International Relations. The result of this research shows that Tiongkok made some movement to save their economy, security and status in international community. Tiongkok come to Afghanistan made military base on that to help Afghanistan Government againts Taliban. Tiongkok also made international economic organizaitation to help economic Asia country.

Keywords : Interest, Conflict, Politic, Security, Talibans

I. Pendahuluan

Afghanistan merupakan negara yang tidak pernah lepas dari konflik, konflik yang terjadi seolah-olah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Afghanistan, konflik Afghanistan terjadi sejak ratusan tahun yang lalu dimulai Pada abad sebelum masehi dimana wilayah Afghanistan di kuasai oleh Alexander Agung pada tahun tahun 330 Sebelum Masehi sampai abad ke-7 Masehi dimana Alexander Agung berniat untuk menguasai wilayah Persia dan India, kemudian Afganistan mengalami masa pengaruh dinasti Mongol (Genghis Khan) dan masa perkembangan Islam, sekitar abad ke-7 hingga abad ke-19.¹

Pemerintah Tiongkok pernah menyampaikan bahwa ingin melihat Afghanistan stabil, Tiongkok khawatir akan kelompok-kelompok separatis di wilayahnya, yakni di Xinjiang, yang berbatasan langsung dengan negara-negara di Asia Tengah. Saat ini Tiongkok tengah membahas kemungkinan membangun sebuah pangkalan militer di sepanjang perbatasan di Afghanistan. Tiongkok merasa perlu mempertegas kehadirannya di Asia Tengah untuk mencegah meluasnya pengaruh dan penyusupan militan Islam di sepanjang Koridor Wakhan untuk beroperasi di wilayah Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengakui rencana tersebut, namun menyebutnya hanya

sebagai kerjasama meningkatkan kapasitas tentara Afghanistan. Pangkalan militer tersebut akan dibangun di Koridor Wakhan, sebuah celah sempit bergunung-gunung di Afghanistan timur laut berbatasan dengan Tiongkok, Tajikistan dan Pakistan.

Tidak hanya itu Tiongkok juga mengkhawatirkan ISIS atau Al-Qaeda dari Suriah dan Irak yang memanfaatkan Afghanistan sebagai batu loncatan untuk mencapai negara tersebut. Perlu diingat, September 2013, pengganti Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri memproklamasikan dukungannya kepada *East Turkestan Islamic Movemen* (ETIM) untuk melawan Tiongkok di Xinjiang. Setahun kemudian giliran Abu Bakr, Al-Baghdadi pemimpin ISIS menyerukan bahwa hak-hak kaum muslim harus direbut dengan paksa di Tiongkok, India dan Palestina.

Perjanjian dengan Afghanistan ini memberi Tiongkok hak untuk menambang minyak di propinsi Sar-i-Pul dan Fariab, kawasan tempat militer Jerman bertugas saat ini. Di sana diperkirakan, ada sumber minyak bumi sebanyak 87 juta barel. Ini adalah jumlah yang kecil, bila dibandingkan kebutuhan minyak dunia. Tetapi tampaknya, Tiongkok memiliki kepentingan yang lebih besar.²

¹ Mapsworld, Afghanistan History: <https://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html>

² dw.com, *cina-afghanistan tandatangani kerjasama pertambangan minyak*, <https://www.dw.com/id/cina-afghanistan->

Kerangka Teori

Untuk memahami suatu permasalahan dan menjawab pertanyaan penelitian diatas, maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran . kerangka pemikiran ini terdiri dari teori, konsep, dan level analisis yang berguna sebagai acuan dan panduan dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini, tingkat analisa dibutuhkan dalam studi hubungan internasional untuk memperjelas proses pembentukan teori. Oleh karena itu penulis menetapkan bahwa tingkat analisa yang tepat adalah negara-bangsa (Nation State) sebagai pembuat keputusan tentang hubungan internasional sebagai suatu unit yang utuh.³

Kerangka dasar dibutuhkan untuk membantu dalam menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memiliki konsep yang tepat sebagai analisa terhadap penelitian. Pada kerangka teori, akan dibahas mengenai perspektif, tingkat analisa, konsep, dan teori sehingga menunjang penelitian untuk menjawab hipotesa penelitian. Dalam melakukan penelitian ini dibutuhkan adanya kerangka pemikiran yang menjadi pedoman peneliti

menemukan, menggambarkan dan menjelaskan objek penelitian.

Pada penelitian kali ini penulis menggunakan perspektif Realisme. Menurut Heraclitus mengatakan bahwa semua manusia adalah hasil dari sebuah konflik. Sebagaimana ditulis oleh Mohammad Hatta pada 1926, Heraclitus mendasarkan pemikirannya pada empat asumsi sebagai berikut: (1) bahwa perjuangan adalah bapak segala sesuatu, (2) bahwa semua sumber mata pencaharian (subsistence) yang ada adalah produk dari lawan yang saling tarik-menarik atau tolak-menolak dasarnya yang satu ingin menyatukan (mengambil dalam satu tangan) dan yang lain ingin membagi, (3) bahwa tata dunia bergerak dinamis karena konflik, dan (4) bahwa perjuangan dalam konflik itu menjadi alasan terbentuknya negara-negara, alasan ambruknya imperium yang mencakup seluruh dunia menjadi sejumlah kecil negara-negara merdeka dan alasan penaklukan satu negara oleh negara yang lain.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tingkat analisa Negara-bangsa, penelaahan difokuskan pada proses pembuatan keputusan tentang hubungan interasional, yaitu politik luar negeri, oleh suatu negara-bangsa sebagai satu kesatuan yang utuh.

tandatangan-kerjasama-pertambangan-minyak/a-15632389

³ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. (Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1990),

⁴ Dugis Vincasio, *teori hubungan Internasional*, (Surabaya; CSGS, 2016)

Di tingkat ini asumsinya adalah semua pembuat keputusan, dimana pun berada, pada dasarnya berperilaku sama apabila menghadapi situasi yang sama. Dengan demikian, analisa harus ditekankan pada perilaku negara-bangsa karena hubungan internasional pada dasarnya didominasi oleh perilaku negara bangsa.⁵

Dalam teori ini menjelaskan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu Negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu memenuhi kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan berjalan dengan stabil, baik dari segi politik, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap bertahan.

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Maka dalam penelitian ini, dapat juga dipahami dengan menganalisa Teori Kepentingan Nasional (*National Interest*). Kepentingan nasional merupakan bentuk pengambilan kebijakan luar negeri yang paling rasional.⁶

Kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi, dan mempertahankan

identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik.⁷

Interaksi antar negara dalam paradigma hubungan internasional banyak ditentukan oleh politik luar negeri negara tersebut. Politik luar negeri tersebut merupakan kebijaksanaan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negeri.

Dalam mengambil kebijakan luar negeri suatu negara, tidak dapat terlepas dari kepentingan nasionalnya. Hal ini karena kekuatan nasional suatu bangsa itu terbatas maka taksiran kebijakan luar negeri haruslah realistis dan beriringan dengan kepentingan nasional suatu negara.⁸

II. ISI

Afghanistan ditemukan dan dipersatukan oleh suku Pashtun pada tahun 1747. Negara ini menjadi negara penyangga (*Buffer State*) antara pemerintah kolonial Inggris dan Kekaisaran Rusia hingga merdeka dari Inggris pada tahun 1919. Pemerintahan demokrasi berakhir pada tahun 1973 dengan kudeta dan sebuah pembalasan kudeta terhadap komunis pada tahun 1978. Uni Soviet kembali menginvasi Afghanistan pada tahun 1979 untuk mendukung rezim komunis Afghanistan, selain berupaya membantu untuk

⁵ Burchil Scott, Linklater Andrew, *Theories of International Relations* (New York: ST Martin's Press, INC, 1996)

⁶ Morgenthau Hans J. *Politics Among Nations: The Struggle for Peace and Power*. (Mc-Graw Hill publishing company, 1993)

⁷ Roy S.L. *Diplomacy*. (Jakarta: Cv Rajawali, 1991) Hlm.32

⁸ Waltz N. Kenneth. *Theories of International Politics*. (Addison-Wesley publishing company, 1979) Hlm.103

memperbaiki kerusakan akibat perang di Afghanistan. Uni Soviet menarik diri dari negara tersebut pada tahun 1989 di bawah tekanan internasional yang mendukung pemberontak mujahidin yang anti-komunis. Rangkaian peristiwa yang terjadi setelah itu adalah jatuhnya kota Kabul ke tangan Taliban pada tahun 1996. Taliban merupakan pergerakan yang didukung oleh Pakistan dan muncul pada tahun 1994 untuk mengakhiri perang saudara di Afghanistan. Pada tahun 2001, tepatnya tanggal 11 September terjadi serangan teroris yang menyebabkan AS beserta sekutunya dan anti Taliban *Northern Alliance* menindak tegas Taliban sebagai tempat persembunyian dari Osama Bin Laden.⁹

Rangkaian peristiwa yang terjadi setelah itu adalah jatuhnya kota Kabul ke tangan Taliban pada tahun 1996. Taliban merupakan pergerakan yang didukung oleh Pakistan dan muncul pada tahun 1994 untuk mengakhiri perang saudara di Afghanistan. Pada tahun 2001, tepatnya tanggal 11 September terjadi serangan teroris yang menyebabkan AS beserta sekutunya dan anti Taliban *Northern Alliance* menindak tegas Taliban sebagai tempat persembunyian dari Osama Bin Laden.¹⁰

Dinamika Konflik antara Afghanistan dan Taliban

Menurut kedutaan besar Afghanistan untuk Indonesia, rezim Taliban berkuasa di Afghanistan dari tahun 1996 hingga 2001. Kedutaan

⁹ CIA.gov., World Factbook, (<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html>),

¹⁰ *Ibid*

besar Afghanistan mengatakan negaranya sedang berusaha bangkit pasca-fase buruk di akhir tahun 1990, atau saat era Taliban. Pada awal pembangunan Afghanistan, yakni pada tahun 2001, kurang dari 1.000 anak yang bersekolah, dan hak-hak wanita sangat dibatasi.¹¹

Perang Soviet-Afghanistan berakhir pada 15 Februari 1989, ditandai dengan keluarnya Boris Gromov komandan 40th Army sekaligus personel militer Soviet terakhir dari Afghanistan. Para mujahidin yang dibantu pemerintah AS menjadi pemenang. Namun bukan berarti konflik di Afghanistan usai begitu saja.

Dalam periode ini terjadi konflik yang melibatkan pemerintah Afghanistan, didukung Uni Soviet hingga tahun 1991, melawan berbagai kelompok mujahidin. Misalnya kelompok Hizbul Islami yang dipimpin Gulbuddin Hekmatyar, kelompok Jamiat Islami yang dipimpin Burhanuddin Rabbani dan Ahmad Shah Massoud, dan Pergerakan Islam Nasionalis Afghanistan yang dipimpin Abdul Rashid Dostum. Para mujahidin yang sebelumnya bersama-sama berjuang melawan militer Soviet mulai tercerai berai, bahkan saling bertempur satu sama lain. Hal ini, salah satunya, disebabkan oleh kekalahan mereka dalam pertempuran di Jalalabad pada Maret 1989.¹²

¹¹<https://international.sindonews.com/read/141547/40/cerita-hancurnya-afghanistan-di-era-rezim-taliban-1474567813>,

¹² Stephen Tanner. (2002). *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the Fall of the Taliban*, Cambridge, MA: Da Capo Press,

Memasuki tahun 1990, Najibullah mulai kehilangan legitimasi atas negaranya setelah di tahun sebelumnya, sebuah kudeta gagal dilancarkan oleh tokoh PDPA dari faksi Khalq, Shah Nawaz Tanai. Pada tahun yang sama, pasukan pemerintah mengalami kekalahan dalam pertempuran di Khost, Herat dan Kandahar. Keadaan semakin diperparah ketika pada desember 1991, Uni Soviet dibubarkan. Hal ini menyebabkan rezim Najibullah yang selama ini menggantungkan kelangsungan negaranya melalui bantuan dari Moskow harus mempertahankan nasibnya sendiri. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para mujahidin untuk mengambil alih kendali pemerintahan Kabul. Para mujahidin saling mengonsolidasikan kekuatannya, dan memulai penyerbuan ke kota-kota yang masih dikuasai pemerintah. Hasilnya, kota Mazar-i-Sharif di utara Afghanistan berhasil dikuasai oleh pasukan koalisi Dostum dan Massoud. Najibullah yang semakin terdesak akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada April 1992, bertepatan dengan jatuhnya kota Kabul ke tangan para mujahidin.¹³

Untuk mencegah konflik berlanjut akibat perebutan kekuasaan, pada 24 April 1992 perwakilan dari berbagai kelompok mujahidin bertemu di Peshawar, Pakistan, untuk merumuskan bagaimana kekuasaan akan dibagi kepada tiap-tiap kelompok secara proporsional. Upaya pembagian kekuasaan sebagaimana dirumuskan dalam Persetujuan Peshawar berakhir dengan kegagalan. Hekmatyar menolak kesepakatan tersebut dan berupaya merebut kekuasaan untuk

kelompoknya sendiri. Akibatnya, pemerintah Afghanistan yang seharusnya dapat terbentuk dari Persetujuan Peshawar tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Konflik pun berlanjut, dengan masing-masing kelompok kembali berperang satu sama lain. Tidak seperti peperangan melawan militer Soviet yang difokuskan di wilayah pedesaan, perang saudara antar kelompok mujahidin terjadi di wilayah perkotaan, mengingat pertempuran yang dilakukan ditujukan untuk merebut pengaruh atas wilayah tersebut.

Dengan pertempuran yang terjadi akhirnya banyak dari warga sipil yang tewas, dan memaksa penduduk yang masih bertahan untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Untuk pertempuran di Kabul saja telah memakan korban hingga 30.000 penduduk sipil dan 100.000 jiwa mengalami luka-luka, belum ditambah dengan tingginya angka para pengungsi dan kerugian infrastruktur akibat bangunan-bangunan yang hancur akibat perang.¹⁴

Kondisi Afghanistan Setelah Kekuasaan Taliban

Binadamai adalah aspek penting dalam sebuah kondisi pasca konflik. Binadamai bertujuan untuk menciptakan perdamaian positif (*Positive peace*) dan perdamaian berkelanjutan (*sustainable peace*). Namun, seringkali binadamai dijadikan sebagai pintu masuk ide-ide demokrasi melalui pendekatan '*Liberal Democratic Peace Theory*'. Gagasan Liberal Democratic Peace Theory adalah meyakini bahwa

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

demokrasi liberal sebagai jalan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Sayangnya, kondisi konflik di tiap-tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda yang tidak bisa hanya menggunakan satu kacamata pendekatan saja. Oleh karenanya, pendekatan yang banyak digunakan dalam proses *peacekeeping* maupun *peacebuilding* justru jarang berbuah demokrasi dan rentan menimbulkan konflik jenis baru. Sekalipun tidak menutup kemungkinan pendekatan liberal *democratic peace theory* juga berhasil di beberapa tempat, seperti Timor Leste, Namibia, Macedonia, Mozambik. Sedangkan, kegagalan binadamai dapat dilihat di Afghanistan, Irak, Rwanda, dan Kosovo.¹⁵

Kemudian korupsi muncul sebagai salah satu faktor kegagalan demokratisasi di Afghanistan. Adanya korelasi antara korupsi, instabilitas politik, dan konflik menjadi penguat mengapa korupsi adalah faktor penting yang perlu diperhatikan dalam proses binadamai. Terlebih ketika aliran dana dalam proses binadamai tidaklah kecil. Maka, ketika dana tersebut tidak tersalurkan dengan baik akibat adanya korupsi, maka proses demokratisasi dalam binadamai pun sulit untuk dicapai.

Transparency International tahun 2014 menyebutkan Afghanistan sebagai salah satu negara dalam indeks persepsi korupsi terkecil. Indeks persepsi korupsi (IPK) adalah cerminan suatu negara

¹⁵ Khurun'in Irza. Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik Sipil di Afghanistan. 2017 Jurnal Tranformasi Global Vol.3 No.1 Hlm 95-96

atas persepsi publik terhadap korupsi elit politik yang menduduki jabatan fungsional pemerintahan. Sekalipun IPK ini tidak bisa menjadi satu-satunya acuan mengenai tingkat korupsi suatu negara, namun bisa menjadi referensi tingkat korupsi. Afghanistan berada di posisi keempat IPK terendah setelah Somalia, Korea Utara, dan Sudan.¹⁶

Tiongkok dalam Konflik di Afghanistan

Perdamaian yang berkelanjutan tidak dapat dicapai kecuali semua pihak belajar dari kesalahan masa lalu dan berhenti meremehkan musuh-musuh mereka. Tidak diragukan lagi bahwa pada akhirnya rakyat Afghanistan yang bertanggung jawab serta harus memiliki dan memimpin proses perdamaian. Namun, untuk mencapai tujuan ini, rakyat Afghanistan membutuhkan bantuan dan niat baik semua negara tetangga dan mitra.¹⁷

Sebagai negara tetangga, sudah berbagai cara demi diplomasi suatu negara demi mewujudkan perdamaian di Afghanistan agar tercapainya kepentingan suatu negara. Begitu halnya dengan negara Tiongkok saat ini demi mempertahankan kedaulatan negaranya. Baik itu Ideologi, keamanan dan ekonomi. Terutama untuk kepentingan Tiongkok di wilayah kawasan Asia Tengah yang

¹⁶ World Bank, 2011, Hlm. 7-8 dalam International, T. (2015). Corruption Perception Index. (daring),

<<https://www.transparency.org/cpi2014/results>>

¹⁷<https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/understanding-taliban-key-peace-afghanistan-190206095855091.html>

berbatasan langsung dengan Tiongkok.

Dalam hal ini presiden Tiongkok Xi Jinping pernah menyampaikan tepatnya pada 10/07/2015 pukul 20.25 WIB bahwa Beijing mengklaim ingin melihat Afghanistan stabil, khawatir akan kelompok-kelompok separatis di Tiongkok, yakni di Xinjiang, yang berbatasan dengan negara-negara di Asia Tengah.¹⁸

Tidak hanya itu, Tiongkok juga memiliki beberapa kepentingan dalam menjaga keamanannya dalam perbatasan terutama dengan negara-negara yang memiliki konflik internal yang hingga saat ini belum terselesaikan seperti negara Afghanistan, Afghanistan hingga saat ini masih belum menyelesaikan konflik dengan kelompok pemberontak Taliban yang sudah berlangsung sejak lama.

Pada masa kontemporer saat ini begitu banyak hal yang telah dilakukan Tiongkok untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan mulai dari dialog, mediasi, negosiasi hingga *Peace Building* antara kedua pihak yang bersengketa di Afghanistan.

Strategi penyelesaian sengketa dimana para pihak setuju untuk menyelesaikan persoalan mereka melalui proses musyawarah dan perundingan. Dengan kata lain, negosiasi adalah suatu proses struktur dimana para pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang

dipeselihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama.¹⁹

Kepentingan yang terdapat dalam satu golongan tertentu selalu dinilai objektif oleh golongan yang bersangkutan dan selalu berdempetan dengan posisi individu yang termasuk ke dalam golongan itu. Seorang individu akan bersikap dan bertindak sesuai dengan cara-cara yang berlaku dan yang diharapkan oleh golongannya. Dalam situasi konflik seorang individu akan menyesuaikan diri dengan peranan yang diharapkan oleh golongan itu yang oleh Dahrendorf disebut sebagai peranan laten.²⁰

Quadrilateral Coordination Group (QCG) yang diprakarsai oleh A.S., Pakistan, Tiongkok dan Afghanistan. AS dan Tiongkok menghadiri pembicaraan yang ditengahi oleh Pakistan pada Juli 2015 di Murree sebagai dua pengamat, Pakistan. Delegasi Taliban Afghanistan termasuk Mullah Mansour, menteri kesehatan pemerintah Taliban Mullah Abbas Stanikzai, dan pemimpin jaringan Haqqani Ibrahim, pemerintah kementerian luar negeri pemerintah Afghanistan Hekmat Karzai, dan anggota Dewan Tinggi Perdamaian Haji Muhammad. Namun, kematian Mullah Omar, dikonfirmasi oleh Taliban, menyebabkan putaran kedua pembicaraan damai pemerintah-Taliban runtuh. Keterlibatan aktif Tiongkok dan AS dalam proses perdamaian awal 2016 ketika mereka

¹⁸www.cnnindonesia.com/internasional/2015/07/10/201337-113-65804/china-janji-membantu-militer-afghanistan

¹⁹ Syahrizal Abbas, MEDIASI dalam Hukum Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Hal. 9-10

²⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, 2004, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada Media Group: Jakarta, Hal. 31

memprakarsai QCG demi perdamaian di Afghanistan. Pada pertemuan QCG kelima pada Mei 2016, perwakilan keempat negara berkonsultasi tentang peta jalan rekonsiliasi nasional dan menyatakan komitmen bersama terhadap Proses perdamaian dan rekonsiliasi yang dipimpin Afghanistan.²¹

Karena QCG membuat kemajuan konkret dalam menggambar peta jalan rekonsiliasi nasional, QCG belum berhasil menyerukan Taliban untuk bergabung dengan inisiatif ini. Alasan mengapa terobosan dalam proses perdamaian begitu sulit melibatkan kematian Mansour. Dengan kematiannya pada 25 Mei 2016 oleh serangan pesawat tak berawak AS di Pakistan, wakil Mansour, Mullah Haibatullah Akhundzada menggantikannya, bersama dengan dua deputi, pemimpin Jaringan Haqqani Sirajuddin Haqqani dan Mullah Yaqoob. Meskipun Mansour sering mengubah sikap negosiasinya dan berulang kali bersumpah untuk berjuang sampai akhir, niatnya adalah untuk mempertahankan Taliban sebagai satu kesatuan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya. Haibatullah berbeda karena dia dianggap sebagai elang Taliban. Karena Haibatullah memiliki dampak negatif pada pengetahuan politik dan militer, itu tidak mungkin lebih efektif daripada Taliban di semua tingkatan. Pada saat itu, pertempuran akan lebih baik daripada berdamai dengan pemerintah. Masalah lain adalah bahwa hubungan antara Afghanistan

dan Pakistan telah memburuk. Tawaran pemerintah Ghani ke Pakistan memprovokasi oposisi domestik yang serius. Sebagai contoh, kepala keamanan Karzai menyalahkan Ghani karena memenuhi tuntutan Pakistan secara membabi buta. Abdul Rabb Rasul Sayyaf juga mengeluh bahwa Ghani adalah diktator dalam pembicaraan damai. Atta Muhammad Nur, gubernur provinsi Balkh, meminta agar semua faksi politik ditampung dalam pembicaraan dengan Taliban. Di bawah tekanan domestik, Presiden Ghani mundur pada kontraterorisme bilateral dan kerjasama intelijen dengan Pakistan. Hubungan bilateral antara Pakistan dan Afghanistan turun lagi. Meskipun QCG mengalami beberapa kemunduran, QCG tetap menyediakan platform yang berguna dan berharga untuk memfasilitasi komunikasi antara berbagai pihak. Sebagai contoh, baik AS maupun Cina mengakui bahwa perlu untuk mengadakan pertemuan QCG di masa mendatang dan di masa yang akan datang kita harus optimis dengan hal itu.²²

Kemudian demi membantu Afghanistan untuk mewujudkan perdamaianya, banyak perusahaan Tiongkok terlibat dalam rekonstruksi ekonomi Afghanistan. Sebagai contoh, *China Metallurgical Corporation* (MCC) memenangkan tender untuk tambang Aynak cooper pada 2007. Menurut kontrak antara MCC dan pemerintah Afghanistan, MCC akan membayar lebih dari 800 juta dolar AS untuk sewa tambang tembaga dan 60 juta dolar AS setiap tahun sebagai pajak. Selain itu, MCC juga berjanji akan membangun

²¹ Wang, Shida. "China's Role in Facilitating the Peace Process of Afghanistan". Berlin. BCAS. 2017 hal.3-4

²² *Ibid*

sekolah, masjid, jalan, rumah sakit, kereta api, pembangkit listrik bersama dengan pabrik besi. Contoh lain adalah proyek cekungan minyak Amu Darya. Kemudian CNPC memenangkan tawaran untuk mengekstraksi cekungan minyak Amu Darya. "Perusahaan akan mengekstraksi 1.950 barel per hari, yang akan sangat membantu Afghanistan menuju kemandirian ekonomi, Usaha Tiongkok dalam membangun perekonomian Afghanistan bersama CNPC yang telah menginvestasikan ratusan juta dolar diharapkan menghasilkan triliunan dolar selama dua dekade mendatang, sebagai gantinya CNPC akan membayar royalti 15 persen untuk minyak, 20 persen pajak perusahaan. Di masa depan, Cekungan Amu Darya harus dapat memasok semua kebutuhan minyak Afghanistan. Pemerintah Tiongkok memberikan bantuan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan mendesak pemerintah Afghanistan. Itu adalah komitmen Tiongkok untuk membantu Afghanistan.²³

Maka dari itu, Tiongkok dalam hal ini tentu memiliki beberapa kekhawatiran terhadap konflik yang terjadi di Afghanistan yang berbatasan langsung dengan provinsi Xinjiang Uyghur, Tiongkok. Disisi lain provinsi Xinjiang ini merupakan provinsi yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Tidak hanya itu Tiongkok juga mengkhawatirkan ISIS atau Al-Qaeda dari Suriah dan Irak yang memanfaatkan Afghanistan sebagai

batu loncatan untuk mencapai negara tersebut.²⁴

Kemudian pada pertengahan 2015 presiden Tiongkok Xi Jin-ping mengaku akan segera mengirimkan sejumlah pasukan, senjata dan perlengkapan militer kepada Afghanistan. Pernyataan tersebut terucap paska diri presiden Tiongkok melakukan pertemuan dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani, di sela-sela pertemuan puncak *Brazil, Rusia, India, China, South Africa* (BRICS) di Rusia. Presiden Tiongkok dalam pernyataannya menyebut, bahwa pengiriman bantuan militer ini semata-mata karena Tiongkok ingin melihat Afghanistan yang lebih aman dan stabil. Selain itu, stabilnya Afghanistan akan memiliki pengaruh besar terhadap Tiongkok.²⁵

III. Kesimpulan

Konflik sipil di Afghanistan tercatat berawal sejak tahun 1978, pada tahun 2001 kelompok Taliban melakukan pemberontakan dan diikuti oleh Amerika yang menuduh kelompok Taliban menyembunyikan pemimpin teroris Al-Qaeda yang telah melakukan penyerangan dengan cara membajak pesawat dan menabrakkan pesawat tersebut di gedung WTC (*World Trade Center*) pada 11 september 2001 yang sudah direncanakan untuk menyerang objek- objek vital milik Amerika.

²⁴ <https://www.kiblat.net/2017/03/01/saat-militer-cina-mulai-terlihat-di-afghanistan-apa-misinya/>

²⁵ <https://international.sindonews.com/read/1022438/41/china-siap-kirim-pasukan-dan-senjata-ke-afghanistan-143652206>

²³ *Ibid*

Kemudian konsep Binadamai mulai dilakukan yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian positif dan berkelanjutan. Kondisi konflik di tiap-tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Afghanistan yang merupakan salah satu negara yang rentan akan terjadinya konflik, konsep Binadamai sangat sulit diterapkan di Afghanistan karna banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Afghanistan. Saat ini Afghanistan menjadi salah satu contoh penerapan konsep Binadamai yang gagal berbuah demokrasi.

Afghanistan merupakan salah satu negara di Asia Selatan yang memiliki konflik yang panjang dalam sejarah perkembangannya, sistem pemerintahan yang legal di Afghanistan adalah berdasarkan campuran sipil dan syariat Islam. pemimpin negara ini sama seperti pemerintahan di negara Demokrasi Presidential yaitu presiden sebagai kepala negara yang juga merangkap sebagai kepala pemerintahan. Cara pemilihan kepala negara dilakukan voting oleh majelis tinggi (*legislatif*).

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya bahwa saat ini begitu banyak negara terutama negara-negara tetangga Afghanistan yang berupaya untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Sebuah kekhawatiran akan konflik yang terjadi di Afghanistan tak kunjung selesai karna dianggap sebagai sebuah ancaman tersendiri bagi negara-negara tetangga Afghanistan.

Pada saat ini Tiongkok yang juga merupakan salah satu negara tetangga terdekat bagi Afghanistan tentunya memiliki beberapa kekhawatiran terhadap konflik yang

terjadi di Afghanistan yang dapat mengganggu kedaulatan Tiongkok. Berbagai upaya yang dilakukan oleh Tiongkok untuk membantu Afghanistan untuk mencapai perdamaian di negara tersebut.

Pertama, Tiongkok membantu Afghanistan dalam bidang pertahanan yang mana Tiongkok mengirim pasukan dan perlengkapan militer kepada Afghanistan untuk melawan tiga kejahatan (*Three Evil*). Hal ini dibuktikan oleh Tiongkok pada tahun 2017 yang mengkonfirmasi tentang keberadaan militernya. Kedua, pada bulan april 2015 Tiongkok melakukan pertemuan di Moskow, Rusia dengan Afghanistan, Iran, Pakistan dan India. Dalam pertemuan ini memiliki agenda utamanya adalah membahas tentang cara-cara untuk membawa perdamaian ke Afghanistan. Ketiga, tidak hanya dalam bentuk bantuan Tiongkok juga melakukan investasi di Afghanistan dalam bentuk pertambangan, ini diawali dengan Tiongkok memasok ke Afghanistan bantuan material senilai 30 juta Yuan dan tunai sebesar USD 1 juta, dilanjutkan dengan janji rekonstruksi Afghanistan senilai USD 150 juta. Kemudian sebuah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2011 dan berlanjut untuk kesepakatan pertambangan baru pada tahun 2014.

Dengan upaya yang telah dilakukan oleh Tiongkok untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Tentunya Tiongkok memiliki beberapa Kepentingan selain menjaga perekonomiannya di kawasan Asia Selatan dan kedaulatan wilayahnya. Pertama, rencana pembangunan pangkalan militer Tiongkok di Afghanistan di wilayah sempit yang bernama koridor

Wakhan. Tujuan dari pembangunan pangkalan militer ini adalah upaya pencegahan dari Tiongkok untuk membendung *Three Evil* agar tidak masuk ke wilayahnya. Kemudian mempertegas kehadirannya di kawasan Asia.

Kedua, Tiongkok memiliki kepentingan terhadap wilayahnya sendiri yaitu Xinjiang, yang mana salah satu kawasan di Tiongkok ini terdapat kelompok-kelompok separatis, Tiongkok mempunyai prioritas untuk membatasi gerakan *East Turkistan Islamic Movement* (ETIM) dari wilayah Xinjiang, kemudian Tiongkok juga memiliki ambisi untuk menjaga seluruh perekonomian yang telah dibangun dengan negara Afghanistan.

Adapun beberapa tambahan penting dari kepentingan Tiongkok seperti menjaga wilayah Xinjiang dari kelompok separatis, memfasilitasi akses dari distribusi energi serta mempertahankan pengaruh negara-negara barat dan Rusia. Karna potensi konflik di Afghanistan bisa mengacaukan keamanan regional yang mengganggu ambisi Tiongkok.

Maka dari itu tidak salah jika banyak negara yang terlibat dalam konflik di Afghanistan, terutama banyak hal yang telah dilakukan oleh negara-negara kawasan Asia Selatan untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan. Mulai dari sebuah pertemuan yang membahas tentang upaya mewujudkan perdamaian di Afghanistan, kemudian bantuan dalam bentuk rekonstruksi pembangunan, perekonomian, hingga

bantuan dalam bentuk bidang pertahanan keamanan.

IV. Referensi

Mapsworld, Afghanistan History:
<https://www.mapsofworld.com/afghanistan/afghanistan-history.html>

dw.com, cina-afghanistan tandatangani kerjasama pertambangan minyak,
<https://www.dw.com/id/cina-afghanistan-tandatangani-kerjasama-pertambangan-minyak/a-15632389>

Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*.(Jakarta: PT.Pustaka LP3ES Indonesia, 1990),

Dugis Vincasio, *teori hubungan Internasional*, (Surabaya;CSGS,2016)
Burchil Scott, Linklater Andrew, *Theories of International Relations*(New York: ST Martin's Press, INC,1996)

Morgenthau Hans J. *Politics Among Nations :The Struggle for Peace and Power*.(Mc-Graw Hill publishing company,1993)

Roy S.L.. *Diplomacy*.(Jakarta : Cv Rajawali,1991) Hlm.32

Waltz N. Kenneath. *Theories of International Politics*.(Addison-Wesley publishing company, 1979) Hlm.103

CIA.gov., World Factbook,
(<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html>),

<https://international.sindonews.com/read/1141547/40/cerita-hancurnya-afghanistan-di-era-rezim-taliban-1474567813>,

Stephen Tanner. (2002). *Afghanistan: A Military History from Alexander the Great to the Fall of the Taliban*, Cambridge, MA: Da Capo Press,

Khurun'in Irza. *Tantangan Binadamai: Kegagalan Demokratisasi Pasca Konflik*

Sipil di Afghanistan.2017 Jurnal
Tranformasi Global Vol.3 No.1 Hlm 95-96

World Bank, 2011, Hlm. 7-8 dalam
International, T. (2015). Corruption
Perception Index.
(daring),
<https://www.transparency.org/cpi2014/results>

[https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/
understanding-taliban-key-peace-
afghanistan-190206095855091.html](https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/understanding-taliban-key-peace-afghanistan-190206095855091.html)

[www.cnnindonesia.com/internasional/20150
710201337-113-65804/china-janji-
membantu-militer-afghanistan](http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150710201337-113-65804/china-janji-membantu-militer-afghanistan)

Syahrizal Abbas, MEDIASI dalam Hukum
Syari'at, Hukum Adat, dan Hukum
Nasional, Hal. 9-10

George Ritzer dan Douglas J. Goodman,
2004, *Teori Sosiologi Modern*, Prenada
Media Group: Jakarta, Hal. 31

Wang.Shida.”*China’s Role in Facilitating
the Peace Process of Afghanistan*”.
Berlin.BCAS.2017 hal.3-4

[https://www.kiblat.net/2017/03/01/saat-
militer-cina-mulai-terlihat-di-afghanistan-
apa-misinya/](https://www.kiblat.net/2017/03/01/saat-militer-cina-mulai-terlihat-di-afghanistan-apa-misinya/)

[https://international.sindonews.com/read/
1022438/41/china-siap-kirim-pasukan-dan-
senjata-ke-afghanistan-143652206](https://international.sindonews.com/read/1022438/41/china-siap-kirim-pasukan-dan-senjata-ke-afghanistan-143652206)